

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan untuk menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dilakukan dengan ikhtiar: (1) menciptakan atau mencari kepemimpinan yang transparan, akuntabel, kreatif, inovatif dan menegakan supermasi hukum berdasarkan tujuan hukum yaitu adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum; (2) menguatkan, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang berorientasi tidak hanya pada *output* pada kemanfaatan (*outcome*) dilakukan secara optimal berdasarkan prinsip *good governance and clean government*; dan (3) menguatkan dan mengembangkan peran partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
- b. penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi pemerintahan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi:
 1. memperjelas aspek materiil, mengenai substansi rumusan norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi;

2. dari *aspek* formil mengenai:
 - a) tata caranya dilakukan dengan tahapan. *Pertama*, dilakukan terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi (UU AP). *Kedua*, apabila terbukti pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang ditindak lanjuti dengan hukum pidana (UU Tipikor); dan
 - b) pembentukan atau penyusunan UU AP tidak terjadi harmonisasi dengan UU Tipikor terutama terkait dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dengan rumusan Pasal 3 UU Tipikor dan terkait dengan kriteria” penyalahgunaan wewenang” yang masih berbeda. Dalam kerangka hukum administrasi negara, kewenangan pejabat pemerintahan dibatasi dengan unsur “penyalahgunaan wewenang” dan “sewenang-wenang”. Sementara itu, dalam kerangka hukum pidana, kriteria yang membatasi kewenangan pejabat pemerintahan berupa unsur *wederrechtlijkheid* dan “menyalahgunakan wewenang”.
 - c) dari aspek penegakan hukum telah terjadi pergeseran kewenangan dari pidana ke kewenangan administrasi. Implikasinya hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama (*primum remedium*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan.
 - d) dari segi norma belum ada pengaturan (*lemteem in het rechts*) yang jelas dan tuntas setelah seorang pejabat membayar

kerugian negara sebagai tanggungjawab seorang pejabat dari segi pidana.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat *roadmap* mengenai perwujudan *good governance*, *clean government* dan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang harus sejalan dengan tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum; dan
- b. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu secara bersama-sama membuat revisi dan mengatur kembali (*lege ferenda*) khususnya Pasal 21 UU AP, agar sesuai dengan pokok pikiran dalam UU AP sebagaimana yang tercantum dalam batang tubuh mengenai kepastian hokum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pejabat pemerintah dan masyarakat serta terciptanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dibidang administrasi dan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- A.Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 200
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group: Jakarta, 2014.
- Abdul Wahid Selayan dan Ahmad Fauzi Ridwan, *Pengertian Umum, Cet.I. Bab I*, Tata Hukum Indonesia, Bintang, Medan, 1960.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-II, Bayumedia, Malang, 2005.
- Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* Yogyakarta: PSKK-UGM, 2002.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdul Wahid. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung: Tarsito, 1993.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 2005.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama)*, Alumni, Bandung, 1987.
- Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

- Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konsruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Jakarta, 2007.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum*. Penerbit Mandar Maju Bandung, 1999.
- Bagir Manan (dkk), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH-UII Press, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Bingham, Tom, *The Rule of Law*, Penguin Books, London, 2011.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1991.
- David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government*, Addison-Wesly Publishing, Massachusetts, 1992.
- Dani Elpah (dkk), *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*, Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Denny Indrayana, *Indonesia Optimis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985.
- E. Utrecht II, *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia*. Ichtiar Jakarta, 1987.

- E.Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (kumpulan karangan)*, Cetakan ke2, Alumni, 1979.
- E.Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983 E.Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Rech.* Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985.
- Friedmann, W., *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Cet. Kedua, Penerjemah: Muhammad Arifin, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- F.X. Adji Samekto, dkk, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Semarang: Walisonngo Research Institute (WRI), 2001.
- Gareth Morgan, 1986, *Images of Organization*, Sage Publication, London, 1986.
- Guy Benveniste, *Birokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1991
- H. A. Muin Fahmal: *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971.
- Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990.
- Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hughes, Owen E. 1998. *Public Management and Administration: An Introduction (Second Edition)*. New York: St. Martin Press
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.

- _____, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*, LPP HAN, Jakarta, 1999.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998.
- Jean Rivero dan Waline dalam Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, The President and Fellowship of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, New York, 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978.
- _____, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia. 1997.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- _____, *Law in America: A Short History*, New York: Modern Library Chronicles Book, 2002.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Lis Febrianda, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Disertasi)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Luthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2011.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006.

- Mahfud M.D., *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
 Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Marbun, Rocky, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1998.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan, Buku Kesatu*, Cet. Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.
- Masyhur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Meuthia Ganie Rahman, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi RI*, Cetakan II, Jakarta, 1952.
- Mulyana W. Kusumah. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni, 1981.

- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, diterbitkan Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009.
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Cetakan Ketiga, Bandung, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Ketiga-1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, *Pengkajian Ilmu Hukum*, (Makalah), Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif) Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Philipus M. Hadjon et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Cetakan VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, et al, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, 2010.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Priyatno, D. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengambilan dan Pelaksana Kebijakan*, Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Unisba, 5 Juni 2010.

- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan & Yurisprudensi*. Alumni, Bandung, 1979.
- R. Wiyono, *Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ralph C Chandler dan Jack C Plano, *The Public Administration Dictionari* 2nd edition. 1988.
- Richard. E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, and Gadamer*, Terj: *Hermeunitika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2002.
- _____, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002.
- _____, *Sekitar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2004.
- _____, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publshing, 2012.
- SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta FH UII Press, 2011.
- _____, *Akuntabilitas Putusan Akbar Tanjung oleh Mahkamah Agung Keterbukaan Keterukuran Sanksi*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003.

- Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Desember 2007.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955
Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Schaffmeister, D.et.all, 1995, *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Liberty, 1995
- Sedermayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bagian Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sheldon S. Stenberg dan David T. Austern, *Government, Ethics and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah*, Bandung: Rosdakarya, 1999.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soerjono Soekanto. *Faktor– faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- _____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Arma Pustaka, 2014.

- Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 1994.
- Sumaryono, *Hermeunetik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, 1999.
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Jakarta: Restu Agung, 2005
- Syamsudin Haris (Ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tri Widodo W. Utomo, *Etika dan Hukum Administrasi Publik*, Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat, 2000.
- O.C Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1970.
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI, Oktober 2004
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Sumber Karya Ilmiah, Majalah, Koran dan Lain-lain

- Abdul Latief, 2015, Orasi Ilmiah, *Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi*, Kampus UMI, Makassar.
- Andhi Nirwanto, *Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Hukum Pidana Administrasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Program Pascasarjana Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2015.
- _____, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*, Materi disampaikan dalam Seminar Nasional “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Ke Depan, dengan topik: Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, HUT Ikahi ke-62, Jakarta, 26 Maret 2015.
- Asep Warlan Yusuf, *Sosialisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, di Hotel Prima Resort, kawasan Sangkanhuri, Kabupaten Kuningan, Kamis 22 Oktober, 2015.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Disertasi) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Surabaya, 2011.
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015 – 2019*, Jakarta, 31 Desember 2013.
- Enny Rohyani, *Implikasi Hukum Dari Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Disertasi) Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif*, Jurnal Keadilan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011.
- _____, *Paper, Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Tindak*

Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Seminar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-7 Mei 2004.

Irving M. Copi, *Intreduction to Logic dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No.6 Tahun XI November-Desember 1994.

Galang Asmara, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Disertasi), Program Pascasarjana Unair Surabaya, 2003.

Gusman, D, *Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Padang Dalam Upaya Mengrrrangi KKN* Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam jurnal Ilmiah Tambun, Vol. VIII, No.3, September-Desember 2009.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.*, Cetakan Kedua., Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Julista Mustamu, *Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi*, (Disertasi) Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar pada tahun 2015 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar pada tahun , 2015.

Kelompok Kerja Akses Terhadap keadilan, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Bappenas Direktorat Hukum dan HAM, Jakarta, 2009.

Laica Marzuki, *Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI* (makalah “Temu Karya Ilmiah Dalam Rangka HUT Peratun ke-26”), Jakarta, 2017.

_____, *Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI*, (makalah “Temu Karya Ilmiah Dalam Rangka HUT Peratun ke-26”), Jakarta, 2017.

M.Syamsudin, *Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan; Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum*, Mimbar Hukum Vol.22,No 3, Oktober 2010.

- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Marwan Effendy, *Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)* (makalah) disampaikan dalam Seminar, dengan tema Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA). di Hotel Bumi Karsa Bidakara–Jakarta, Selasa 11 Mei 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995.
- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.
- Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.
- _____, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Cetakan kesembilan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Priyatno, D. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengambilan dan Pelaksana Kebijakan*, Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Unisba, 5 Juni 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002 PN.Jkt.Pst tanggal 4 September 2002 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Putusan No. 171/Pid/2002/PT.DKI tanggal 17 Januari 2003 dan selanjutnya kedua putusan tersebut

dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 572K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004.

Radillah Khaerany, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid. B/ 2011/Pn.Mks)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2012.

Ridwan Khairandy, *Iklm Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 5, No. 2, 2006.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002.

_____, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2002.

_____, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2015.

_____, *Dibalik Palu Mahkamah Konstitusi: Telaah Judicial Review Terhadap komisi Pemberantasan Korupsi*”, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta 2005 Dalam Rusma Dwiwana, *Equality Before The Law vs Impunity: Suatu Dilema* Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, LAN Jakarta (tanpa tahun).

Sadu Wasistiono, *Kontribusi Ilmu Administrasi Publik Dalam Menangani Permasalahan Bangsa*, paper yang dipresentasikan dalam seminar “Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Menangani Permasalahan Bangsa”, FISIP – Unpar, 2006.

Stephan Golub, *Beyond Rule of Law Orthodoxy : The Legal Empowerment Alternative, Rule of Law series, Democracy and Rule of Law Project*, Number 41, 2003.

Sofian Effendi, *Reformasi Aparatur Negara guna Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka*, dalam *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, ed.at, *Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media–MAP-UGM, 2009.

- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soenaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*. Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003.
- Soewoto Mulyosudarno, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat*, (makalah) disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun, 18-19 April 2000.
- Tatiek Sri Djatmiati, (2004) *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Triyana Dewi Serodja, *Implementasi dan Implikasi Asas Kekhususan Sistematis Pada Tindak Pidana Telekomunikasi yang dilakukan Korporasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi*. (Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015.
- Oswald Jansen (ed), *Administrative Sanction in the European Union*, Intersentia, 2013 dalam Romli Atmasasmita, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2015.

C. Sumber Websites

- Arifiyadi Teguh, *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601, diunduh 2 Agustus, 2015, pukul 16.32 Wib.
- Dino Yudha, *Penerapan New Public Management di Indonesia*: diakses dari <http://dinojudha.wordpress.com/2009/05/14/pererapan-new-public-maagement-di-indonesia-sebuah-opini/>, pada tanggal 28 September 2016.
- Lalolo Krina, *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, [Http//goodgovernance:Bappenas.go.id./informasi.Htm](http://goodgovernance:Bappenas.go.id./informasi.Htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diunduh 27 Mei 2016, Pukul 20.48, Wib.

<http://asmisiangka.blogspot.co.id/2013/02/hukum-dasar-tertulis-danhukum-dasar.html>, dengan Topik: *Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis*. Diunduh pada tanggal 17 Nopember 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter%20II.pdf>, diunduh tanggal 4 Maret 2013, pukul 17.28, wib.

<http://gagasanhukum.wordpress.com> perbuatan-melawan-hukum-materil-(Bagian III) diunduh tanggal 4 Febuari 2016, pukul 17. 31 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter%20II.pdf>, diunduh tanggal 4 Febuari 2016, pukul 21.34 Wib.

<http://www.legalitas.org/?q=node/216>, diunduh tanggal 23 Mei 2016, pukul 11.36 Wib.

<http://www.jambiekspres.co.id/opini/16376-memahami-sistem-akuntabilitas.html>, diunduh 23 April 2016, pukul 16.38 Wib.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI , diunduh dari laman resmi Kejaksaan RepublikIndonesia,<http://www.kejaksaan.go.id/upling/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2016, Pukul 12.05 Wib.

Yahya. A.Z. *Keadilan dan kepastian hukum*,[http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan -dan-kepastian-hukum.html](http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html)., diunduh tanggal 7 Mei 2010.

D. Sumber Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25Tahun2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010– 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neptisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan